



Gubernur Minta Usut Tuntas

Kejati Selidiki Dugaan Korupsi Bansos Covid-19



TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalbar H Sutarmidji angkat bicara terkait dugaan korupsi bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, yang saat ini diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi. Sutarmidji menyatakan dengan tegas tidak mentolerir penyelewengan bansos, ia pun mendukung kepolisian dan kejaksaan un-



Saya izinkan semuanya untuk di usut saja

H Sutarmidji
Gubernur Kalbar

tuk mengusutnya. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar telah melakukan konferensi pers yang dipimpin langsung Kepala Kejati (Kajati) Jaya Kesuma didampingi Asintel Chandara Yahya Wello dan Kasi Penyidikan Pidsus M Nursaltias di Kantor Kejati Kalbar, Selasa (26/5).

Dalam konferensi tersebut disampaikan bahwa ada sekitar delapan pegawai Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalbar yang diperiksa oleh Kejati Kalbar terkait penyelidikan dugaan adanya penyelewengan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19.

Sutarmidji mengatakan terkait bansos di perhubungan (BPTD) bahwa pemprov tidak tahu karena dana langsung dari Kementerian Perhubungan Pusat yang dikelola langsung oleh Satker dan tidak

melalui Pemprov Kalbar.

"Insyaallah kalau untuk bantuan yang langsung ke provinsi tercatat dengan baik dan penyalurannya juga. Semuanya nanti akan diumumkan lewat media dari mana bantuan tersebut dan bantuannya apa karena pertanggung jawaban publik itu penting," kata Midji, sapaannya akrabnya kepada Tribun, Rabu (27/5).

Midji menyatakan sangat mendukung jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk menindak lanjuti setiap keluhan masyarakat tentang pemotongan bansos apapun dan berapa jumlahnya, serta dalam bentuk apa. Karena dalam kondisi seperti ini tidak boleh ada pemotongan apapun dan sebagainya.

"Contoh ada bantuan sembako non tunai dengan nominal Rp 200 ribu. Jadi sudah banyak yang sms ke saya bahwa mereka disuruh ambil di toko tertentu yang sudah ditunjuk, tapi harganya lebih mahal dan lebih murah kalau beli kontan. Hal ini juga salah," ujarnya.

Kemudian dirinya juga mendengar bahwa ada pemotongan bantuan mulai Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu. "Kalau ada 5.000 warga besar juga yang dipotong,"

■ Bersambung ke hal. 10



Gubernur Minta Usut Tuntas

ucapnya.

Ia menyampaikan terkait pembelian atau pemberian bantuan harus jelas. Dikatakannya, mana yang dibantu dan mana yang dibeli harus jelas. "Saya mau semua jelas dan penyimpangan sebesar apapun tidak akan ditolerir sama sekali. Saya izinkan semuanya untuk di usut saja," tegasnya.

Ia menegaskan apabila ada temuan serupa yang harus ditindak terkait bantuan dalam kondisi Covid-19 maupun bukan untuk bantuan Covid-19 harus ditindak tegas. "Sebab tidak boleh ada pemotongan apapun baik hibah provinsi, bansos dan bantuan apapun namanya tidak boleh. Saya tidak akan

tolerir dan tanggung jawab pribadi masing-masing," tegasnya.

Ia mencontohkan misalnya rumah ibadah yang memberikan kepada siapa pun dana bantuan itu akan di-*blacklist* dan tidak boleh menerima bantuan dalam bentuk apapun lagi.

"Tidak hanya itu kalau dari dinas, dinas juga saya tindak. Lalu kalau dari lembaga, maka lembaganya juga akan saya *blacklist* dan pelakunya saya akan serahkan kepada aparat penegak hukum," tukasnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Jaya Kesuma, mengatakan pihaknya akan secepatnya melakukan pengungkapan tersangka

kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Balai Perhubungan yang akan disalurkan kepada masyarakat di Rasau Jaya Kubu Raya Kalbar yang terdampak corona.

Meski tidak menetapkan target dalam proses penyelidikan, namun Kejati Kalbar akan secepatnya mengungkap pelaku penyelewengan bansos Covid-19.

"Tidak ada target dalam proses pengungkapan ini, tapi akan secepatnya terungkap karena ini masalah publik dan korupsi bansos. Proses ini pun mengikuti SOP, jadi satu hari tidak bisa selesai," ungkapnya.

Saat ini Kejati Kalbar telah mengamankan sedikitnya

kurang lebih 300 sembako dari pelaku penyelewengan bansos Covid-19 yang dilakukan oleh inisial D dan B.

Kajati menuturkan akan terus dilakukan proses penyelidikan kepada para pelaku dan masih melakukan penyelidikan barang bukti dari pelaku. Kesuma mengatakan pihaknya masih dalam proses pencarian berbagai barang bukti untuk menetapkan tersangka. Ia pun menyebutkan barang bukti yang nantinya akan diamankan.

"Barang bukti dokumen berita acara serah terima pekerjaan kontrak kerja, dokumen laporan 100 persen bantuan yang disalurkan dan mungkin ada berupa uang nantinya," ungkapnya. **(oki)**

Sambungan Hal.9